

## PENGARUH SE BAPEPAM NO. 02 TAHUN 2002 TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Abdul Rohman ✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang  
Kampus Tembalang, Semarang 50239

Diterima: 12 November 2009. Disetujui: 15 Desember 2009. Dipublikasikan: Maret 2010

---

### Abstrak

Penelitian ini menghitung indeks-indeks yang mengungkap laporan keuangan di berbagai industri. Tujuannya adalah untuk memberi saran terhadap badan, saran tersebut berhubungan dengan kebijakan mengenai kepastian perusahaan publik dan berfokus pada pengungkapan laporan keuangannya di Indonesia. Penelitian yang pertama menganalisis pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan publik di Indonesia sebelum perealisasi kebijakan BAPEPAM tahun 2002. Metode yang digunakan adalah identifikasi laporan keuangan dan pengaturan indeks yang mengungkap laporan keuangan pada 13 industri. Kemudian, yang kedua adalah identifikasi pengungkapan laporan keuangan setelah diterapkannya kebijakan BAPEPAM pada tahun 2002. Hasil *t-test*, ditemukan perbedaan indeks yang signifikan. Indeks tersebut mengungkap laporan keuangan sebelum dan sesudah pengeluaran kebijakan BAPEPAM tahun 2002.

### Abstract

*This research computes the indexes that reveal the financial report in industries. In addition, it aims at giving suggestion to an agency. The suggestion relates to the policy about completing the certainty of public firms and focus on revealing the financial reports in Indonesia. First, this research analyzed the practice of revealing financial report on public firm in Indonesia before prevailing the realization of BAPEPAM policy in 2002. The method used was financial report identification and index arrangement that reveals the financial report in thirteen industries. Then, the second was identifying the practice of revealing financial report after implementing the BAPEPAM policy in 2002. The result of *t-test*, shows that there are significant different indexes. They reveals the financial reports before and after the Implementing of BAPEPAM policy in 2002.*

© 2010 Universitas Negeri Semarang

**Keywords:** *disclosure indexes; financial statement; index arrangement*

---

### Pendahuluan

Selama ini kajian tentang pengungkapan informasi laporan keuangan secara komprehensif belum banyak dilakukan di Indonesia. Padahal status laporan keuangan perusahaan adalah bersifat wajib untuk diungkapkan (*mandatory disclosure*). Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji secara empiris mengenai praktek pengungkapan informasi laporan keuangan perusahaan publik yang ada di Indonesia. Praktek pelaporan keuangan di Indonesia selama ini mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan bagi perusahaan yang *go public*, pihak BAPEPAM telah mengatur tentang format dan isi laporan keuangan ter-

masuk informasi yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No.06/PM/2000 dan peraturan VIII.G.7. Keharusan mengungkapkan jenis-jenis informasi oleh BAPEPAM maupun oleh SAK tersebut disebut sebagai “*Mandatory Disclosure*.” *Mandatory Disclosure* ini wajib dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melindungi para investor maupun kreditur dari praktek menyembunyikan informasi oleh manajemen perusahaan publik yang sering terjadi di Pasar Modal (Subiyantoro, 2007).

Terdapat tiga prinsip pengungkapan yang dapat diterapkan dalam laporan keuangan, yaitu “*adequate, fair, dan full*” (Bryant, 2010). Pengungkapan yang *adequate* adalah pengungkapan yang cukup memberikan informasi kepada pemakai, namun cukup disini mengandung arti adanya keterbatasan (*minimum level*) dalam penyajian informasi sehingga ada kecenderungan penyajian informasi seminimal mungkin asal tidak menyesatkan pemakai. Sedangkan prinsip pengungkapan yang *fair* mengandung tujuan untuk memberikan informasi yang lengkap guna kepentingan umum dan bukan kepentingan pihak-pihak tertentu saja.

Mekanisme pengungkapan keuangan secara *full disclosure* dalam Undang-undang Perseoran Terbatas No. I tahun 1995 telah diatur beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Khusus mengenai prinsip transparansi keuangan, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa direksi perusahaan diharuskan menerbitkan laporan keuangan yang meliputi paling tidak laporan keuangan tahunan terakhir yang harus diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan dalam surat kabar nasional.

Lebih lanjut, pihak BAPEPAM melalui aturannya nomor 38 tahun 1996 berusaha lebih memperjelas aturan tersebut dengan mengeluarkan aturan tentang hal-hal apa saja yang harus dirinci oleh perusahaan publik dalam menerbitkan laporan tahunan mereka (Herwidayatmo, 2000). Laporan tahunan harus mencakup ikhtisar data keuangan penting perusahaan untuk periode lima tahun, analisis dan pembahasan oleh manajemen, penjelasan mengenai investasi/divestasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan transaksi dengan pihak afiliasi serta laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Perkembangan terakhir dari pengungkapan item mandatori dalam laporan keuangan menjadi lebih jelas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua BAPEPAM No.02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 yang berisikan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan publik di Indonesia. Aturan ini dilatarbelakangi hasil survei pada para pengguna laporan keuangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia masih belum memenuhi prinsip keterbukaan dan transparansi.

Fenomena asimetri informasi selama ini menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Manajemen sebagai pihak yang tahu persis gambaran kinerja perusahaan mereka hanya memberikan sebagian informasinya kepada pihak luar (Anggraini, 2006). Masalahnya kecenderungan pihak manajemen untuk mengungkapkan hal-hal yang bagus saja kepada investor akan dapat menyesatkan investor dalam melakukan pengambilan keputusan. Jika tidak ada pengaturan terhadap *mandatory disclosure* yang harus diungkapkan, maka perusahaan bisa memberikan informasi yang salah saji secara material dan berdampak negatif terhadap pengambilan keputusan (Tamomo, 2009).

Kriteria pertama yaitu ketersediaan informasi (*availability of information*) menyangkut tingkat keluasan dan kualitas pengungkapan yang diperlukan untuk pembuatan keputusan investasi. Perbedaan dalam aspek ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan aturan antara negara maju dan negara berkembang. Kriteria kedua, keandalan menyangkut keandalan dari standar akuntansi yang digunakan serta kemampuan untuk memberlakukan standar tersebut secara efektif di negara yang bersangkutan. Sedangkan kriteria ketiga yaitu tingkat keterbandingan (*comparability*) berkaitan dengan sejauh mana laporan keuangan di satu negara dapat dibandingkan dengan laporan keuangan di negara yang lain. Keterbandingan sendiri ditentukan oleh dua aspek.

## Metode

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahap awal dilakukan pemilihan sampel terhadap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dengan beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut diantaranya adalah: (1) Perusahaan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000, tahun dimana pengambilan data dilakukan untuk tahun pertama penelitian, (2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap yang telah diaudit dan dipublikasikan ke publik selama dua tahun terakhir sebelum dikeluarkannya aturan Surat Edaran BAPEPAM No. 02/PM/2002. Menurut IAI, komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan, (3) Dilakukan pengambilan sampel secara proporsional pada tiap sektor industri untuk seluruh tiga belas sektor industri. Sampel yang diambil harus dapat mewakili industri tersebut. Untuk itu jumlah pengambilan sampel minimal 10% dari jumlah perusahaan dalam satu industri, kecuali jika dalam satu industri hanya terdapat lima perusahaan atau kurang maka akan diambil seluruhnya untuk industri yang bersangkutan.

Setelah dilakukan pemilihan sampel dilakukan identifikasi item-item pengungkapan laporan keuangan masing-masing perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah studi komparasi antara item-item yang tercantum didalam laporan keuangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM dalam sebuah *checklist*.

Selanjutnya dari seluruh komponen informasi dalam laporan keuangan tahunan dibuat suatu model indeks pengungkapan laporan keuangan. Indeks dibuat untuk masing-masing industri. Menurut keputusan BAPEPAM terdapat total tiga belas industri dengan bentuk penyajian dan pengungkapannya masing-masing. Secara umum pengungkapan item tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu item yang harus diungkapkan untuk seluruh industri dan item yang harus diungkapkan khusus untuk industri tertentu.

Indeks pengungkapan laporan keuangan dihitung terlebih dahulu secara individual untuk masing-masing laporan yang ada di laporan keuangan. Jadi terdapat lima jenis indeks pengungkapan untuk lima komponen laporan keuangan. Perhitungannya dilakukan melalui rasio antara skor yang diberikan kepada perusahaan dengan laporan keuangannya (FS) dengan skor maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan (M). Indeks tersebut ditentukan dengan cara yang konsisten dengan penelitian sebelumnya (Cooke, 1991; Hossain *et al.*, 1994; Sabeni, 2001). Perhitungan indeks pada penelitian ini menggunakan pendekatan *weighted approach*, yaitu dengan memberikan bobot tertimbang pada masing-masing item. Beberapa langkah untuk menentukan indeks pengungkapan tiap perusahaan adalah sebagai berikut: (1) Melakukan penilaian (*scoring*) terhadap item-item pada setiap komponen laporan keuangan (FS) yang diungkapkan oleh perusahaan, (2) Melakukan penilaian (*scoring*) terhadap nilai maksimum yang dapat diperoleh perusahaan (M) mengacu pada pedoman dari BAPEPAM untuk tiga belas industri, (3) Menghitung indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) secara individual untuk setiap komponen laporan keuangan, (4) Menghitung indeks pengungkapan total (TDI) yang merupakan gabungan dari indeks setiap komponen laporan keuangan (DI).

## Hasil dan Pembahasan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000 yang menyampaikan Laporan Keuangan. Menurut *JSX Statistik 2<sup>nd</sup> Quartet 2001*, perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2000 yang menyampaikan laporan keuangan sebanyak 242 perusahaan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive* dengan kriteria sebagaimana disebutkan di muka. Sampel yang diambil harus dapat mewakili *emitent* dan pengambilan sampel mini-

mal 10% dari jumlah perusahaan dalam satu industri, kecuali jika dalam satu industri hanya terdapat lima perusahaan atau kurang diambil seluruhnya untuk industri yang bersangkutan. Berdasarkan tahapan dan kriteria tersebut, diperoleh sampel penelitian sebanyak 34 perusahaan dari 12 sektor.

Tahap penelitian selanjutnya setelah jumlah sampel dan perusahaan sebagai sampel ditetapkan adalah mengidentifikasi item-item yang termasuk dalam pengungkapan semua komponen laporan keuangan yang diterbitkan untuk masing-masing perusahaan dalam kelompok industri. Komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Item-item ini, selanjutnya digunakan sebagai *checklist* pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel.

Komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan atas kelima komponen laporan keuangan tersebut merupakan pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) sehingga bobot tertimbang untuk mengungkapkan setiap item diberi skor 1 (100%) dan skor 0 jika tidak mengungkapkan.

Indeks pengungkapan laporan keuangan dilakukan dengan langkah-langkah; pertama, menentukan nilai terhadap item-item pada setiap laporan keuangan (FS); kedua, menentukan nilai terhadap maksimum yang dapat diperoleh perusahaan (M); ketiga, menghitung indeks pengungkapan laporan keuangan secara individu untuk setiap kompoenen laporan keuangan (DI), keempat menghitung indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI). Penghitungan dilakukan untuk periode sebelum terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002, yaitu tahun 2000-2001 dan sesudah yaitu tahun 2003 dan 2004. Hasil perhitungan DI dan TDI untuk masing-masing perusahaan sampel dan kelompok industri secara rinci dapat dilihat dalam lampiran indeks pengungkapan. Tabel 1 (dalam lampiran), berikut disajikan ringkasan indeks pengungkapan laporan keuangan secara individual (DI) dan indeks pengungkapan total (TDI) untuk 12 kelompok industri periode sebelum terbitnya peraturan BAPEPAM No. 02/PM/2002:

Berdasarkan hasil perhitungan DI komponen laporan neraca sebelum terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002, diperoleh gambaran bahwa secara umum untuk seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan neraca pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No. 2/PM/2002 tertinggi diperoleh PT Astra Internasional dan HM Sampoerna dengan besaran indeks yang sama, yaitu sebesar 0,732, terendah adalah PT Cipendawa Agro Industri dengan indeks pengungkapan (DI) sebesar 0,400. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI tertinggi diperoleh kelompok investasi sebesar 0,6915 dan kelompok rendah adalah peternakan sebesar 0,400.

Indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan rugi-laba pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 tertinggi diperoleh PT Astra Internasional dan HM Sampoerna dengan besaran indeks yang sama, yaitu sebesar 1.000, terendah adalah PT Fast Food Indonesia dan PT BAT Indonesia dengan indeks pengungkapan (DI) yang sama besar, yaitu 0,643. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI tertinggi diperoleh kelompok konstruksi sebesar 0,923 dan kelompok dengan indeks rendah adalah restoran sebesar 0,643.

Secara umum untuk seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan perubahan ekuitas pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAP-EPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 0,875 yang diperoleh empat perusahaan, yaitu PT Uniliver Indonesia Tbk, PT Unggul Indah Cahaya, Telkom, dan PT Matahari Putra Prima. Terendah adalah PT Bukit Sentul dengan indeks pengungkapan (DI) 0,125. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan perubahan ekuitas tertinggi diperoleh kelompok telekomunikasi sebesar 0,8125 dan kelompok dengan indeks rendah adalah real estate sebesar 0,416667.

Indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan arus kas pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 0,640 dipe-

roleh oleh PT Surya Semesta Internusa. Terendah adalah PT Bakre Brothers dengan indeks pengungkapan (DI) 0,200. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan arus kas tertinggi diperoleh kelompok perhotelan sebesar 0,635 dan kelompok dengan indeks rendah adalah investasi sebesar 0,275.

Seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan catatan atas laporan keuangan pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 0,596 diperoleh oleh PT Bimantara Citra. Terendah adalah PT Cipendawa Agro Industri dengan indeks pengungkapan (DI) 0,181. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan catatan atas laporan keuangan tertinggi diperoleh kelompok investasi sebesar 0,4855769 dan kelompok dengan indeks rendah adalah peternakan sebesar 0,181.

Indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) pada tahun sebelum dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 3,264 diperoleh oleh PT Astra International. Terendah adalah PT Cipendawa Agro Industri dengan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) sebesar 2,238. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) tertinggi diperoleh kelompok telekomunikasi sebesar 3,0729629 dan kelompok dengan indeks rendah adalah peternakan dengan indeks sebesar 2,238.

Penghitungan indeks pengungkapan untuk periode pasca terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002, tahapannya sama dengan penghitungan indeks pengungkapan sebelum terbitnya peraturan tersebut. Hasil perhitungan DI dan TDI untuk masing-masing perusahaan sampel dan kelompok industri, baik indeks pengungkapan laporan keuangan secara individual (DI) dan indeks pengungkapan total (TDI) untuk 12 kelompok industri pasca terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002 dapat dilihat dalam Tabel 2 (tersaji dalam lampiran).

Berdasarkan hasil perhitungan DI komponen laporan neraca pasca terbitnya peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002, diperoleh gambaran bahwa indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan neraca pada tahun pasca dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 tertinggi diperoleh PT Ciputra Development, yaitu sebesar 0,851, terendah adalah PT Cipendawa Agro Industri dengan indeks pengungkapan (DI) sebesar 0,478. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI tertinggi diperoleh kelompok investasi sebesar 0,808 dan kelompok rendah adalah peternakan sebesar 0,478.

Seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan rugi-laba pada tahun setelah dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 tertinggi diperoleh PT Astra Internasional dan Indosat dengan besaran indeks yang sama, yaitu sebesar 1.000, terendah adalah PT Unilever Indonesia Tbk dengan indeks pengungkapan (DI) sebesar, yaitu 0,786. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI tertinggi diperoleh kelompok perkebunan sebesar 0,964 dan kelompok dengan indeks rendah adalah restoran sebesar 0,821.

Secara umum untuk seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan perubahan ekuitas pada tahun setelah dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 1.000 yang diperoleh tujuh perusahaan, yaitu PT Unggul Indah Cahaya, PT Tempo Scan Pacific, PT Bakrie Brothers, PT Telkom, PT Enseval Putra MT, PT Matahari Putra Prima dan PT Zebra Nusantara. Terendah adalah PT Bukit Sentul dengan indeks pengungkapan (DI) 0,375. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan perubahan ekuitas tertinggi diperoleh kelompok transportasi dengan indeks sebesar 1.000 dan kelompok dengan indeks rendah adalah *real estate* sebesar 0,625.

Indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan arus kas pada tahun setelah dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 0,840 diperoleh oleh PT Surya Semesta Internusa. Terendah adalah PT Alakasa Industrindo dengan indeks pengungkapan (DI) 0,423. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan arus kas tertinggi diperoleh kelompok restoran sebesar 0,78 dan kelompok dengan indeks rendah adalah investasi sebesar 0,5.

Indeks pengungkapan laporan keuangan (DI) untuk komponen laporan catatan atas laporan keuangan pada tahun setelah dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 0,692 diperoleh oleh PT Bimantara Citra. Terendah adalah PT Bukit sentul dengan indeks pengungkapan (DI) 0,204. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan DI komponen laporan catatan atas laporan keuangan tertinggi diperoleh kelompok investasi sebesar 0,55769 dan kelompok dengan indeks rendah adalah peternakan sebesar 0,206.

Secara umum untuk seluruh kelompok industri, indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) pada tahun setelah dikeluarkan aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 indeks tertinggi sebesar 3,788 diperoleh oleh PT Bimantara Citra. Terendah adalah PT Alakasa Industrindo dengan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) sebesar 2,904. Sedangkan dilihat dari kelompok, indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) tertinggi diperoleh kelompok investasi sebesar 3,6537783 dan kelompok dengan indeks rendah adalah peternakan dengan indeks sebesar 3,046.

Berdasarkan hasil perhitungan, secara umum menunjukkan bahwa indeks pengungkapan pasca terbitnya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002 lebih baik disbanding sebelum adanya aturan tersebut. Peningkatan kualitas indeks pengungkapan terjadi baik pada pengungkapan secara individual (DI) komponen laporan keuangan maupun secara total (TDI), seperti dapat kita lihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2. Pada Subbab berikut akan diuraikan secara rinci perbedaan indeks pengungkapan sebelum dan pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002, serta hasil uji beda (*T-test*) untuk melihat apakah perbedaan sebelum dan sesudah aturan tersebut signifikan.

Indeks pengungkapan neraca per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan neraca sebelas kelompok industri mengalami kenaikan, kecuali kelompok perkebunan mengalami penurunan indeks sebesar 0,069, dimana sebelum aturan memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,482 dan sesudah aturan turun menjadi 0,42. Dari sebelas kelompok tersebut, yang mengalami kenaikan indeks tertinggi kelompok restoran sebesar 0,131. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok jalan tol sebesar 0,055. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen neraca sebesar 0,0790181.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen laporan neraca untuk semua emiten, bahwa emiten untuk semua kelompok industri semuanya mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Kenaikan tertinggi diperoleh PT Ciputra Development dengan kenaikan 0,149, kenaikan terkecil diperoleh PT Sari Husada sebesar 0,049. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0,095.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji *T-Test* untuk laporan neraca, menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan neraca adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 0,5882 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 0,6829. Berdasarkan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen neraca antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Kesimpulan yang dapat diambil adalah aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan komponen laporan neraca yang lebih baik.

Pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 sebagian besar emiten yang menjadi sampel mengalami kenaikan indeks pengungkapan laporan rugi laba. Tabel 1 dan Tabel 2, menunjukkan bahwa indeks pengungkapan rugi laba per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan rugi laba sebelas kelompok industri mengalami kenaikan, kecuali kelompok investasi mengalami penurunan indeks sebesar 0,03162 dimana sebelum aturan memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,89062 dan sesudah aturan turun menjadi 0,859. Berdasarkan sebelas kelompok tersebut, yang mengalami kenaikan indeks tertinggi kelompok perdagangan sebesar 0,1669. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok transportasi sebesar 0,036. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen rugi laba sebesar 0,1087733.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen laporan rugi laba untuk semua emiten, sebagian besar emiten mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Perusahaan yang mengalami indeks pengungkapan yang stabil dengan tingkat pengungkapan yang maksimal sebesar 1,000 adalah PT Astra Internasional dan PT Ciputra Development dengan indeks pengungkapan rugi laba sebelum dan sesudah sebesar 0,929. Perusahaan yang mengalami penurunan adalah PT Bimantara Citra dari 0,906 menjadi 0,875, dan PT Bakrie Brothers dari 0,875 menjadi 0,844. Kenaikan indeks pengungkapan DI komponen rugi laba tertinggi diperoleh PT Bakrieland Development dan PT Bakrie Sumaytra Plantation dengan kenaikan indeks yang sama sebesar 0,250, kenaikan terkecil diperoleh PT Zebra Nusantara sebesar 0,036. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0,116.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji *T-Test* untuk laporan rugi laba, menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan rugi laba adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 0,7929 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 0,9087. Hasil perhitungan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen rugi laba antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan komponen laporan rugi laba yang lebih baik.

Pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 sebagian besar emiten yang menjadi sampel mengalami kenaikan indeks pengungkapan laporan perubahan ekuitas. Tabel 2 dan Tabel 3, menunjukkan bahwa indeks pengungkapan neraca per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan laporan perubahan ekuitas semua kelompok industri mengalami kenaikan. Kenaikan indeks tertinggi kelompok transportasi dan peternakan dengan kenaikan indeks masing-masing sebesar 0,375. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok restoran sebesar 0,18. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen laporan perubahan ekuitas sebesar 0,2321567.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen laporan perubahan ekuitas untuk semua emiten, bahwa semua emiten untuk semua kelompok industri mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Perusahaan yang mengalami indeks pengungkapan yang stabil adalah PT Uniliver Indonesia Tbk dengan indeks pengungkapan laporan perubahan ekuitas sebelum dan sesudah sebesar 0,875. Kenaikan indeks pengungkapan DI komponen laporan perubahan ekuitas tertinggi diperoleh PT Tempo Scan Pacific, PT Zebra Nusantara, dan PT Cipendawa Agro Industri, dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,375. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0,220851.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji *T-Test* untuk laporan perubahan ekuitas, menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan laporan perubahan ekuitas adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 0,6334 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 0,8544. Hasil perhitungan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen laporan perubahan ekuitas antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan komponen laporan perubahan ekuitas yang lebih baik.

Pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 sebagian besar emiten yang menjadi sampel mengalami kenaikan indeks pengungkapan laporan arus kas. Tabel 1 dan Tabel 2, menunjukkan bahwa indeks pengungkapan neraca per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan laporan arus kas semua kelompok industri mengalami kenaikan. Kenaikan indeks tertinggi kelompok investasi dengan kenaikan indeks sebesar 0,225. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok

jalan tol sebesar 0,084. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen laporan arus kas sebesar 0,1498333.

**Tabel 1.** Indeks Pengungkapan Laporan Keuangan Individual (DI) dan Indeks Pengungkapan Total (TDI) per Kelompok Industri Periode Sebelum Terbitnya Peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002

Kelompok	Neraca	Laba/ Rugi	DI		Catt ats LK	TDI
			L.Perb. Ekts	Arus Kas		
Manufaktur	0,595	0,7714	0,6291667	0,4935897	0,2453047	2,7337986
Investasi	0,6915	0,89062	0,6428571	0,275	0,4855769	2,9859195
Jalan tol	0,489	0,917	0,5	0,604	0,207	2,716
Perhotelan	0,588	0,714	0,688	0,635	0,257	2,881
Restoran	0,536	0,643	0,695	0,58	0,268	2,652
Telekomunikasi	0,535	0,8333	0,8125	0,5576923	0,3056075	3,0729629
Konstruksi	0,5635	0,923	0,6875	0,52	0,2292453	2,923652
Perdagangan	0,66545	0,7381	0,75	0,474359	0,2496795	2,8153083
Transportasi	0,583	0,893	0,625	0,548	0,197	2,845
<i>Real Estate</i>	0,65333	0,8333	0,416667	0,474359	0,2125786	2,5900907
Peternakan	0,4	0,714	0,5	0,442	0,181	2,238
Perkebunan	0,489	0,75	0,6875	0,538	0,2532468	2,768981

Sumber: Data primer yang diolah

**Tabel 2.** Indeks Pengungkapan Laporan Keuangan Individual (DI) dan Indeks Pengungkapan Total (TDI) per Kelompok Industri Periode Pasca Terbitnya Peraturan BAPEPAM No.02/PM/2002

Kelompok	Neraca	Laba/ Rugi	DI		Catt ats LK	TDI
			L.Perb. Ekts	Arus Kas		
Manufaktur	0,683	0,893	0,846	0,633	0,2618638	3,3215763
Investasi	0,808	0,859	0,9285714	0,5	0,5576923	3,6537783
Jalan tol	0,544	0,958	0,75	0,688	0,219	3,159
Perhotelan	0,675	0,857	0,875	0,75	0,277	3,435
Restoran	0,667	0,821	0,875	0,78	0,278	3,421
Telekomunikasi	0,649	0,917	0,9375	0,712	0,3205608	3,535202
Konstruksi	0,67	0,942	0,875	0,7	0,2433962	3,4309167
Perdagangan	0,71	0,905	0,958	0,641	0,2657051	3,4801435
Transportasi	0,667	0,929	1	0,69	0,218	3,503
<i>Real Estate</i>	0,766	0,952	0,625	0,615	0,2286164	3,1871477
Peternakan	0,478	0,929	0,875	0,558	0,206	3,046
Perkebunan	0,42	0,964	0,875	0,673	0,2727273	3,4157717

Sumber: Data primer yang diolah

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen laporan arus kas untuk semua emiten, bahwa semua emiten untuk semua kelompok industri mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Kenaikan indeks pengungkapan DI komponen laporan arus kas tertinggi diperoleh PT Bakrie Brothers dengan kenaikan sebesar 0,250. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0,148915.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji *T-Test* untuk laporan arus kas, menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan laporan arus kas adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 0,4953 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 0,6442. Hasil perhitungan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil



dari 0,05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen laporan arus kas antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan komponen laporan arus kas yang lebih baik.

Pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 semua emiten yang menjadi sampel mengalami kenaikan indeks pengungkapan laporan catatan atas laporan keuangan. Tabel 1 dan Tabel 2, menunjukkan bahwa indeks pengungkapan neraca per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan laporan catatan atas laporan keuangan semua kelompok industri mengalami kenaikan. Kenaikan indeks tertinggi kelompok investasi dengan kenaikan indeks sebesar 0,0721154. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok restoran sebesar 0,01. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen laporan catatan atas laporan keuangan sebesar 0,0214435.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen laporan catatan atas laporan keuangan untuk semua emiten, bahwa semua emiten untuk semua kelompok industri mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Kenaikan indeks pengungkapan DI komponen laporan catatan atas laporan keuangan tertinggi diperoleh PT Bimantara Citra dengan kenaikan sebesar 0,096. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0,019861.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji *T-Test* untuk laporan catatan atas laporan keuangan, menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan laporan catatan atas laporan keuangan adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 0,2566 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 0,2766. Hasil perhitungan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen laporan catatan atas laporan keuangan antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten untuk mengungkapkan komponen laporan catatan atas laporan keuangan yang lebih baik.

Pasca aturan BAPEPAM No.2/PM/2002 semua emiten yang menjadi sampel mengalami kenaikan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI). Tabel 1 dan Tabel 2, menunjukkan bahwa indeks pengungkapan TDI per-kelompok industri periode sebelum adanya aturan dan sesudah adanya aturan terdapat perbedaan. Sesudah adanya aturan, kualitas indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) semua kelompok industri mengalami kenaikan. Kenaikan indeks tertinggi kelompok peternakan dengan kenaikan indeks sebesar 0,808. Kenaikan terkecil diperoleh kelompok jalan tol sebesar 0,443. Rata-rata kenaikan indeks dilihat dari kelompok industri untuk komponen total laporan keuangan (TDI) sebesar 0,6138186.

Dilihat dari indeks pengungkapan secara individual per emiten (DI) untuk komponen total laporan keuangan (TDI) untuk semua emiten, bahwa semua emiten untuk semua kelompok industri mengalami kenaikan indeks pengungkapan setelah adanya aturan. Kenaikan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) tertinggi diperoleh PT. Tempo Scan Pacific dengan kenaikan sebesar 0,843. Kenaikan rata-rata untuk 34 emiten sebesar 0,600077.

Berdasarkan hasil uji beda seperti yang dapat dilihat dalam lampiran hasil uji *T-Test* untuk total laporan keuangan (TDI), menunjukkan bahwa rata-rata arah perubahan indeks pengungkapan total laporan keuangan (TDI) adalah positif, pada tahun 2000-2001 sebesar 2,7665 dan pada tahun 2003-2004 sebesar 3,3664. Hasil perhitungan uji t, menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil analisis adalah signifikan. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan individual (DI) komponen total laporan keuangan (TDI) antara sebelum dengan sesudah adanya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan BAPEPAM tersebut, mendorong emiten

untuk mengungkapkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi-laba, arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan yang lebih baik.

## Penutup

Kesimpulan artikel ini diantaranya pengungkapan atas laporan keuangan utama yang terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan pengungkapan yang bersifat wajib (100%), sehingga seharusnya tidak ada hal yang tidak diungkapkan atas komponen laporan keuangan utama tersebut. Gambaran indeks pengungkapan sebelum keluarnya aturan BAPEPAM No.02/PM/2002, berdasarkan hasil perhitungan indeks pengungkapan laporan keuangan emiten sampel, baik secara individual laporan keuangan (DI) maupun secara total laporan keuangan (TDI), baik secara kelompok industri maupun perindividu perusahaan secara umum masih kurang dari indeks pengungkapan laporan utama yang bersifat wajib (indeks = 1).

Berdasarkan hasil perhitungan indeks pengungkapan laporan keuangan emiten sampel pasca aturan BAPEPAM No.02/PM/2002, baik secara individual laporan keuangan (DI) maupun secara total laporan keuangan (TDI), baik secara kelompok industri maupun perindividu perusahaan secara umum masih kurang dari indeks pengungkapan laporan utama yang bersifat wajib (indeks = 1). Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis uji-t atas indeks pengungkapan laporan keuangan sebelum dan sesudah aturan BAPEPAM No.02/PM/2002 baik secara individual maupun secara total terdapat perbedaan yang positif, dan signifikan.

Sebagai saran, sanksi yang tegas perlu ditegakkan kepada emiten-emiten yang menyajikan laporan keuangan utama yang kurang memenuhi kriteria pengungkapan yang lengkap. Jika sanksi tegas tidak ditegakkan, kualitas pengungkapan laporan keuangan yang disampaikan oleh para emiten akan semakin jelek. Hal ini akan merugikan pengguna informasi keuangan.

Memberi penghargaan kepada emiten yang penyajian laporan keuangannya sudah memenuhi kriteria pengungkapan yang ada. Perlu mengefektifkan lembaga pengawas yang ada untuk memantau tingkat pengungkapan laporan keuangan yang disampaikan emiten. Meninjau ulang tentang aturan dan kebijakan-kebijakan tentang kewajiban bagi emiten untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap.

IAI harus senantiasa melakukan evaluasi atas standar akuntansi yang sudah diterbitkan, apakah standar akuntansi yang ada mengandung *overload standards* atau tidak. Sosialisasi standar yang sudah diterbitkan perlu dilakukan IAI, hal ini penting untuk mengeliminir adanya kebingungan pemakai standar.

## Daftar Pustaka

- Anggraini, F.R.R. 2006. *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)*, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus 2006
- Arifin. 2001. *Consensus Between Users and Preparers on The Importance of Voluntary Disclosure Items in Annual Reports: An Indonesian Study*, Proceeding Asian Academy Management Conference, Johor Bahru, Malaysia
- BAPEPAM. 2002. *Pedoman Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik di Indonesia*. SE-Ketua BAPEPAM No.02/PM/2002 Tanggal, 27 Desember 2002
- Bryant, L. 2010. *Home Sustainability Policy and Mandatory Disclosure A Survey of Buyer and Seller Participation and Awareness in Qld*. Emerald Group Publishing Limited
- Herwidayatmo. 2000. *Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia*. *Majalah Usahawan*, Vol. 29 No. 10
- Na'im, A.F.R. 2000. Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan

- Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 70 - 82
- Tamtomo, D.S. 2009. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan. *Orbit*, Vol. 5 No. 1, 167-171
- Sabeni, A. 2002. An Empirical Analysis of the Relation between The Board of Director's Composition and the Level of Voluntary Disclosure, *The Fifth Indonesian Conference on Accounting*, Semarang, 46-57
- Saudagaran, S.M. dan J.G. Diga. 2000. Financial Reporting in Emerging Capital Market: Characteristics and Policy Issues. *Accounting Horizon*, Vol. 11 No. 2
- Subiyantoro, E. 2007. Dampak Perubahan Kultur Masyarakat Terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9 No. 1, 18-29